

## HUBUNGAN PEMETAAN SOSIAL DAN PARTISIPASI POLITIK: KAJIAN SOSIOLOGIS TENTANG STRATEGI DAN TANTANGAN KPU KOTA KUPANG

Yuniati Rade Modjo<sup>1</sup>, Marianto Liberti<sup>2</sup>, Lilis Neken<sup>3</sup>, Helga Maria E. Garo<sup>4</sup>, Yosep Emanuel Jelahun<sup>5</sup>

[yuniantirademodjo@gmail.com](mailto:yuniantirademodjo@gmail.com)<sup>1</sup>, [mariantoliberti09@gmail.com](mailto:mariantoliberti09@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[chandraneken730@gmail.com](mailto:chandraneken730@gmail.com)<sup>3</sup>, [helgagero@gmail.com](mailto:helgagero@gmail.com)<sup>4</sup>, [yosep.jelahun@staf.undana.ac.id](mailto:yosep.jelahun@staf.undana.ac.id)<sup>5</sup>  
Universitas Nusa Cendana

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan antara praktik pemetaan sosial yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dan tingkat partisipasi politik warga. Dengan pendekatan studi dokumen dan analisis kebijakan, tulisan ini mengevaluasi strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Kota Kupang, hambatan implementasi di lapangan, serta implikasinya terhadap partisipasi pemilih. Temuan menunjukkan bahwa pemetaan sosial sebagai alat identifikasi kelompok rentan dan pemilih potensial memperkuat target sosialisasi, tetapi efektivitasnya dibatasi oleh kendala sumber daya, akses informasi, dan variasi tingkat partisipasi antar-wilayah. Rekomendasi diarahkan pada penguatan kapasitas data, kolaborasi aktor lokal, dan inovasi komunikasi agar pemetaan sosial berkontribusi lebih nyata pada peningkatan partisipasi politik.

**Kata Kunci:** Pemetaan Sosial, Partisipasi Politik, KPU Kota Kupang, Sosialisasi Pemilih, Strategi Kelembagaan.

### ABSTRACT

*This study analyzes the relationship between social mapping practices conducted by the Kupang City General Elections Commission (KPU) and the level of citizen political participation. Using a document study and policy analysis approach, this paper evaluates the KPU's voter education and outreach strategies, implementation barriers in the field, and their implications for voter participation. Findings indicate that social mapping, as a tool for identifying vulnerable groups and potential voters, strengthens outreach targets, but its effectiveness is limited by resource constraints, information access, and variations in participation levels across regions. Recommendations focus on strengthening data capacity, collaborating with local actors, and innovating communications to ensure social mapping contributes more significantly to increased political participation.*

**Keywords:** Social Mapping, Political Participation, Kupang City KPU, Voter Outreach, Institutional Strategy.

### PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Dalam konteks pemerintahan lokal, tingginya partisipasi pemilih bukan hanya mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menunjukkan tingkat literasi politik, kepercayaan publik, serta efektivitas lembaga penyelenggara pemilu dalam memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki mandat strategis untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap informasi kepemiluan. Salah satu pendekatan yang dipandang penting dalam mendukung tugas ini adalah pemetaan sosial.

Pemetaan sosial merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, dan kondisi sosial masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Melalui pemetaan sosial, kelembagaan pemilu dapat memahami keragaman kelompok pemilih, seperti pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih di

wilayah padat penduduk, kelompok adat, hingga masyarakat dengan tingkat literasi rendah. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menyusun strategi sosialisasi, menentukan kanal komunikasi yang tepat, serta memperkirakan tantangan yang mungkin muncul dalam proses peningkatan partisipasi politik. Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki dinamika sosial dan politik yang unik. Keragaman etnis, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, serta variasi kondisi sosial ekonomi antar-kelurahan menjadikan wilayah ini memerlukan pendekatan sosialisasi pemilu yang kontekstual. Meskipun partisipasi pemilih di beberapa pemilu terakhir menunjukkan tren fluktuatif, upaya peningkatan partisipasi terus dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Namun begitu, variasi tingkat partisipasi di wilayah-wilayah tertentu menunjukkan adanya kesenjangan dalam efektivitas intervensi yang dilakukan.

Partisipasi politik masyarakat Kota Kupang pada pemilu sebelumnya menunjukkan fluktuasi, dipengaruhi oleh faktor mobilitas penduduk, heterogenitas sosial, dan tingkat literasi politik yang beragam. Selain itu, proses sosialisasi pemilu masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya akses informasi pada kelompok tertentu, apatisisme politik, serta keterbatasan pelibatan tokoh lokal sebagai agen sosialisasi. Kondisi ini menunjukkan urgensi pemetaan sosial bagi KPU Kota Kupang dalam merencanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pemetaan sosial memungkinkan KPU mengidentifikasi karakteristik pemilih, persebaran masalah sosial-politik, serta strategi komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga program peningkatan partisipasi politik dapat berjalan lebih efektif. KPU Kota Kupang mulai menerapkan pendekatan pemetaan sosial sebagai dasar dalam tepat sasaran.

Dengan demikian, strategi sosialisasi yang dibangun tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih terarah (*targeted*), sesuai kondisi dan karakteristik sosial di lapangan. Akan tetapi, implementasi pemetaan sosial tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Berbagai hambatan ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur komunikasi, serta rendahnya literasi politik pada kelompok tertentu. Tantangan-tantangan ini memengaruhi optimalisasi pemetaan sosial dan efektivitas program sosialisasi yang dijalankan oleh KPU Kota Kupang.

Melihat tantangan dan peluang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pemetaan sosial dan partisipasi politik dalam konteks kerja kelembagaan KPU Kota Kupang. Kajian ini tidak hanya menelaah strategi yang telah dilakukan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan implementasi dan menawarkan rekomendasi berbasis analisis sosiologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktik dalam upaya penguatan demokrasi lokal di Kota Kupang.

Tujuan pemetaan sosial dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat, mengetahui segmentasi pemilih, serta memetakan wilayah rawan dan dinamika sosial yang memengaruhi partisipasi politik. Pemetaan sosial dilakukan agar KPU dapat menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih efektif, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemetaan sosial membantu mengenali hambatan partisipasi, mengidentifikasi sumber daya lokal serta aktor-aktor kunci, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan perspektif sosiologis untuk memahami hubungan antara pemetaan sosial yang dilakukan KPU Kota

Kupang dan tingkat partisipasi politik masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses pemetaan sosial, partisipasi politik, serta strategi dan tantangan yang dihadapi KPU Kota Kupang dalam pelaksanaan tugasnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang dianggap relevan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, yang menjadi lokasi utama penelitian karena memiliki tugas penting dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, merancang strategi sosialisasi politik, melibatkan komunitas lokal dalam partisipasi politik. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai partisipasi politik strategi dan tantangan KPU Kota Kupang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi Budaya (SEB) Pemilih Kota Kupang**

Dalam penelitian ini, gambaran kondisi sosial ekonomi budaya (SEB) pemilih Kota Kupang diposisikan sebagai fondasi utama pemetaan sosial yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat. Kondisi SEB dipahami tidak sekadar sebagai deskripsi demografis, melainkan sebagai faktor struktural dan kultural yang memengaruhi perilaku memilih serta efektivitas strategi sosialisasi pemilu.

Secara demografis, Kota Kupang memiliki karakter masyarakat yang heterogen dengan dominasi kelompok usia produktif. Struktur demografi ini memberikan potensi besar bagi peningkatan partisipasi politik, namun dalam praktiknya menunjukkan variasi tingkat partisipasi antar wilayah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta stabilitas domisili pemilih. Dalam konteks ini, pemetaan sosial menjadi instrumen penting bagi KPU untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kerentanan partisipasi yang berbeda-beda, sehingga strategi sosialisasi tidak dilakukan secara seragam.

Dari sisi sosial ekonomi, mayoritas pemilih Kota Kupang bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan sektor informal. Kondisi pekerjaan yang cenderung tidak stabil serta tekanan ekonomi sehari-hari berimplikasi pada rendahnya prioritas sebagian masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok pekerja informal dan buruh seringkali mengalami keterbatasan waktu dan akses informasi politik, yang berdampak pada rendahnya keterlibatan mereka dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pemetaan sosial digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sosial ekonomi yang rentan terhadap eksklusi politik dan merancang pendekatan sosialisasi yang lebih kontekstual. Dimensi budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat Kota Kupang. Meskipun bersifat multietnis, masyarakat Kota Kupang memiliki ikatan sosial dan komunal yang kuat. Peran tokoh adat, tokoh agama, dan figur lokal masih sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemetaan sosial membantu KPU Kota Kupang dalam mengenali aktor-aktor kunci di tingkat komunitas yang dapat dijadikan mitra strategis dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk akibat urbanisasi dan migrasi internal menjadi tantangan tersendiri dalam

pemutakhiran data pemilih dan kesinambungan partisipasi politik. Perpindahan penduduk yang relatif cepat menyebabkan fluktuasi tingkat partisipasi antar kelurahan dan kecamatan. Dalam situasi ini, pemetaan sosial berfungsi sebagai alat untuk membaca dinamika sosial yang terus berubah dan menyesuaikan strategi kelembagaan secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi keberadaan kelompok pemilih rentan, seperti pemilih pemula, pemilih disabilitas, kelompok adat, dan pekerja sektor informal. Kelompok-kelompok tersebut menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengakses informasi kepemiluan. Melalui pemetaan sosial, KPU Kota Kupang dapat mengidentifikasi persebaran kelompok rentan serta merumuskan strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, gambaran kondisi sosial ekonomi budaya pemilih Kota Kupang menegaskan bahwa pemetaan sosial merupakan pendekatan strategis yang krusial dalam meningkatkan partisipasi politik. Pemetaan sosial memungkinkan KPU Kota Kupang memahami kompleksitas sosial masyarakat, mengidentifikasi hambatan partisipasi, serta merancang intervensi sosialisasi yang lebih efektif dan berbasis konteks lokal.

## **2. Temuan Pemetaan Sosial: Segmentasi Partisipasi Politik**

Pemetaan sosial yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang dalam konteks penelitian ini menghasilkan temuan penting mengenai segmentasi partisipasi politik masyarakat. Segmentasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keaktifan pemilih tidak bersifat homogen, melainkan berbeda-beda berdasarkan usia, gender, kondisi disabilitas, serta karakteristik wilayah tempat tinggal. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi politik merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan akses informasi.

Hasil pemetaan sosial memperlihatkan bahwa pemilih aktif umumnya berasal dari kelompok usia dewasa dan lanjut usia yang memiliki stabilitas tempat tinggal serta keterikatan sosial yang kuat dengan lingkungan komunitasnya. Kelompok ini relatif konsisten menggunakan hak pilih dan lebih responsif terhadap sosialisasi pemilu yang dilakukan melalui tatap muka, forum keagamaan, serta pendekatan berbasis tokoh lokal. Sebaliknya, pemilih pasif banyak ditemukan pada segmen pemilih muda, pemilih pemula, serta masyarakat dengan mobilitas tinggi. Kelompok ini menunjukkan kecenderungan partisipasi yang fluktuatif dan lebih rentan terhadap apatisme politik. Selain faktor usia, wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kepadatan penduduk besar juga menunjukkan proporsi pemilih pasif yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki kohesi sosial lebih kuat. Dari perspektif gender dan disabilitas, pemetaan sosial mengungkap bahwa perempuan dan pemilih disabilitas belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam kegiatan sosialisasi pemilu. Meskipun tidak selalu pasif secara sikap, keterbatasan akses fisik, informasi, dan representasi menyebabkan partisipasi mereka cenderung lebih rendah di beberapa wilayah tertentu.

Penelitian ini menemukan bahwa setiap segmen pemilih memiliki karakteristik informasi, motivasi, dan hambatan yang berbeda. Pemilih aktif umumnya memiliki kebiasaan mengakses informasi politik melalui jaringan sosial langsung, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pertemuan komunitas. Motivasi utama mereka untuk berpartisipasi adalah rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan kepercayaan terhadap proses pemilu. Hambatan yang mereka hadapi relatif kecil dan lebih bersifat teknis. Sementara itu, pemilih pasif—terutama pemilih muda dan pekerja sektor informal—lebih bergantung pada media digital dan media sosial sebagai sumber informasi politik. Namun, informasi yang diterima seringkali bersifat parsial, tidak terverifikasi, dan kurang mendalam, sehingga tidak selalu mendorong keterlibatan politik yang aktif. Hambatan utama

kelompok ini meliputi rendahnya literasi politik, keterbatasan waktu akibat aktivitas ekonomi, serta sikap skeptis terhadap efektivitas pemilu. Pada kelompok pemilih disabilitas dan komunitas adat, hambatan partisipasi lebih bersifat struktural dan kultural. Keterbatasan aksesibilitas, kurangnya materi sosialisasi yang ramah disabilitas, serta pendekatan yang belum sepenuhnya sensitif terhadap nilai-nilai lokal menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi. Pemetaan sosial membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan ini sehingga KPU dapat menyesuaikan metode dan kanal sosialisasi.

Temuan segmentasi partisipasi politik ini menegaskan bahwa pendekatan sosialisasi pemilu yang bersifat umum tidak lagi memadai. Pemetaan sosial memungkinkan KPU Kota Kupang mengklasifikasikan pemilih berdasarkan tingkat keaktifan dan karakteristik sosialnya, sehingga strategi sosialisasi dapat dirancang secara lebih terarah. Dengan memahami perbedaan motivasi dan hambatan setiap segmen, KPU memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun program pendidikan pemilih yang inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, segmentasi partisipasi politik yang dihasilkan melalui pemetaan sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis sosial, tetapi juga sebagai pijakan strategis dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Kupang secara berkelanjutan.

### **3. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Politik**

Berdasarkan hasil pemetaan sosial yang dianalisis dalam penelitian ini, tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kupang dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan faktor pendukung yang saling berkelindan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi budaya pemilih serta efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang.

#### **a. Faktor Penghambat Partisipasi Politik**

Penelitian menemukan bahwa kurangnya akses terhadap informasi kepemiluan menjadi salah satu penghambat utama partisipasi politik. Meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai kanal, pemetaan sosial menunjukkan bahwa informasi pemilu belum menjangkau seluruh segmen pemilih secara merata, terutama kelompok pekerja sektor informal, pemilih dengan tingkat pendidikan rendah, serta masyarakat dengan mobilitas tinggi. Informasi yang diterima sering bersifat umum dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok sasaran.

Selain itu, hambatan aksesibilitas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga memengaruhi partisipasi, khususnya bagi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Pemetaan sosial mengungkapkan bahwa kendala fisik dan teknis ini masih menjadi faktor signifikan yang menyebabkan sebagian pemilih tidak menggunakan hak pilihnya secara optimal.

Faktor penghambat lain yang teridentifikasi adalah rendahnya tingkat kepercayaan terhadap proses politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Sikap skeptis dan apatisme politik muncul sebagai respons terhadap pengalaman politik sebelumnya, persepsi bahwa suara individu tidak membawa perubahan signifikan, serta pengaruh wacana negatif di media sosial. Kondisi ini diperkuat oleh fenomena kelelahan politik (*political fatigue*), terutama pada pemilih muda dan masyarakat perkotaan yang sering terpapar isu politik tanpa diimbangi pemahaman substantif.

Dari sisi budaya, penelitian juga mencatat keberadaan pola hubungan patrimonial dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana pilihan politik sebagian pemilih masih dipengaruhi oleh figur berpengaruh atau relasi kuasa tertentu. Budaya ini dapat membatasi partisipasi politik yang rasional dan otonom, serta mengurangi minat pemilih untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

b. Faktor Pendukung Partisipasi Politik

Di sisi lain, pemetaan sosial juga mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Kota Kupang. Salah satu faktor utama adalah peran komunitas keagamaan, yang memiliki jaringan luas dan tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. Forum keagamaan terbukti efektif sebagai ruang penyampaian informasi pemilu dan pembentukan kesadaran politik, terutama bagi pemilih dewasa dan lanjut usia.

Peran lembaga pendidikan dan kampus juga menjadi faktor pendukung signifikan, khususnya dalam menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula. Lingkungan akademik relatif terbuka terhadap diskursus politik dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika cenderung lebih diterima dan berdampak positif terhadap partisipasi. Selain itu, tokoh lokal dan tokoh adat berperan sebagai agen penghubung antara KPU dan masyarakat. Keberadaan tokoh-tokoh ini mampu meningkatkan legitimasi pesan sosialisasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dalam banyak komunitas, rekomendasi dan ajakan dari tokoh lokal lebih berpengaruh dibandingkan sosialisasi formal kelembagaan.

Faktor pendukung lainnya adalah jejaring keluarga dan kekerabatan yang masih kuat dalam struktur sosial masyarakat Kota Kupang. Diskusi politik dalam lingkup keluarga menjadi sarana informal yang efektif dalam membentuk sikap politik dan mendorong kehadiran pemilih di TPS. Pemetaan sosial menunjukkan bahwa wilayah dengan kohesi sosial dan ikatan keluarga yang kuat cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih stabil.

Temuan mengenai faktor penghambat dan pendukung ini menegaskan pentingnya pemetaan sosial sebagai instrumen strategis bagi KPU Kota Kupang. Dengan memahami secara komprehensif hambatan dan potensi yang ada di setiap segmen masyarakat, KPU dapat merancang strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis konteks lokal. Dengan demikian, pemetaan sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi masalah, tetapi juga sebagai dasar penguatan faktor-faktor pendukung partisipasi politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kota Kupang.

#### **4. Hasil Evaluasi Kinerja Sosialisasi KPU Kota Kupang**

Evaluasi kinerja sosialisasi KPU Kota Kupang dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah efektivitas metode sosialisasi, jangkauan segmen pemilih, serta implikasinya terhadap tingkat partisipasi politik, dengan merujuk pada hasil pemetaan sosial. Evaluasi ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian administratif semata, melainkan sebagai analisis sosiologis terhadap sejauh mana strategi sosialisasi mampu menjawab keragaman karakteristik pemilih di Kota Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode sosialisasi tatap muka masih menjadi pendekatan yang paling efektif dalam membangun pemahaman dan kepercayaan pemilih, terutama pada kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Sosialisasi berbasis komunitas, pertemuan keagamaan, dan forum lokal memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, klarifikasi informasi, serta penguatan legitimasi pesan pemilu. Dalam konteks pemetaan sosial, metode ini dinilai paling sesuai untuk wilayah dengan kohesi sosial yang kuat dan tingkat literasi politik yang beragam. Sementara itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital menunjukkan efektivitas yang relatif tinggi dalam menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula. Media digital dinilai efisien dari sisi jangkauan dan kecepatan distribusi informasi, namun penelitian mencatat bahwa dampaknya terhadap peningkatan partisipasi tidak selalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat informasi digital yang

sering bersaing dengan konten non-politik, serta rendahnya kedalaman pemahaman pemilih terhadap pesan yang disampaikan. Adapun pelibatan tokoh adat dan tokoh agama terbukti menjadi strategi yang sangat strategis dalam konteks sosial budaya Kota Kupang. Tokoh-tokoh ini berfungsi sebagai opinion leader yang memiliki legitimasi sosial tinggi, sehingga mampu meningkatkan tingkat penerimaan pesan sosialisasi. Pemetaan sosial membantu KPU mengidentifikasi aktor lokal yang berpengaruh, sehingga sosialisasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kultural dan kontekstual.

Cakupan sosialisasi KPU Kota Kupang menunjukkan peningkatan dibandingkan strategi sebelumnya yang cenderung bersifat umum. Dengan pendekatan berbasis segmentasi pemilih, sosialisasi menjadi lebih terarah, khususnya dalam menjangkau kelompok pemilih rentan seperti pemilih pemula dan komunitas tertentu. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa cakupan sosialisasi belum sepenuhnya merata, terutama pada kelompok pekerja sektor informal dan masyarakat dengan mobilitas tinggi. Respons pemilih terhadap sosialisasi bervariasi antar segmen. Pemilih aktif cenderung merespons positif dan menunjukkan peningkatan kesadaran politik, sedangkan pemilih pasif masih membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh metode, tetapi juga oleh kesesuaian pendekatan dengan kondisi sosial ekonomi pemilih.

Dibandingkan dengan strategi sosialisasi pada pemilu sebelumnya, penelitian ini mencatat adanya pergeseran pendekatan dari sosialisasi massal ke sosialisasi berbasis pemetaan sosial. Pada pemilu sebelumnya, sosialisasi cenderung dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan segmentasi pemilih secara mendalam, sehingga dampaknya terhadap peningkatan partisipasi relatif terbatas. Dengan penerapan pemetaan sosial, KPU Kota Kupang mulai mengadopsi strategi yang lebih adaptif dan berbasis data. Meskipun peningkatan angka partisipasi belum sepenuhnya signifikan di seluruh wilayah, penelitian menemukan adanya perbaikan pada beberapa kecamatan yang menjadi fokus sosialisasi berbasis komunitas dan pelibatan tokoh lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan sosial memberikan kontribusi positif, meskipun masih menghadapi kendala sumber daya dan konsistensi implementasi.

Hasil evaluasi ini menegaskan bahwa kinerja sosialisasi KPU Kota Kupang menunjukkan tren perbaikan secara kualitatif, terutama dari sisi pendekatan dan segmentasi pemilih. Namun, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan kolaborasi dengan aktor lokal, serta optimalisasi integrasi media tatap muka dan digital. Dengan demikian, evaluasi kinerja sosialisasi ini menempatkan pemetaan sosial sebagai instrumen strategis yang krusial dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi pemilu dan mendorong partisipasi politik masyarakat Kota Kupang secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **a. Hubungan Pemetaan Sosial dan Partisipasi Politik**

Pemetaan sosial merupakan instrumen strategis dalam memahami struktur, karakteristik, dan dinamika masyarakat secara komprehensif. Dalam konteks politik elektoral, pemetaan sosial berfungsi sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan demografis suatu wilayah memengaruhi tingkat dan pola partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga mencakup kesadaran politik, keterlibatan dalam diskusi publik, serta kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu.

Secara sosiologis, partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, akses informasi, serta ikatan sosial berbasis adat, agama,

dan komunitas lokal. Oleh karena itu, pemetaan sosial menjadi alat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terhadap apatisisme politik, marginalisasi, atau keterputusan informasi politik. Melalui pemetaan sosial, KPU dapat memahami variasi tingkat partisipasi di setiap kecamatan dan kelurahan, serta faktor sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks Kota Kupang yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi, pemetaan sosial menjadi semakin relevan. Kota Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ruang pertemuan berbagai identitas sosial yang membentuk preferensi dan perilaku politik masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemetaan sosial dan partisipasi politik bersifat saling terkait dan menentukan efektivitas strategi penyelenggaraan pemilu.

#### **b. Strategi KPU Kota Kupang Berbasis Pemetaan Sosial**

KPU Kota Kupang memanfaatkan pemetaan sosial sebagai dasar perumusan strategi peningkatan partisipasi pemilih. Salah satu strategi utama adalah segmentasi pemilih berdasarkan karakteristik sosial tertentu, seperti pemilih pemula, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat perkotaan dan pinggiran. Segmentasi ini memungkinkan KPU merancang metode sosialisasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Pendekatan sosialisasi berbasis komunitas menjadi strategi penting yang lahir dari hasil pemetaan sosial. KPU Kota Kupang tidak hanya mengandalkan media formal, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam perspektif sosiologi, tokoh-tokoh lokal memiliki modal sosial yang kuat dan mampu memengaruhi sikap serta perilaku politik masyarakat. Keterlibatan mereka membantu meningkatkan legitimasi pesan-pesan kepiluan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

pemetaan sosial membantu KPU dalam menentukan wilayah prioritas sosialisasi, khususnya daerah dengan tingkat partisipasi politik yang relatif rendah. Wilayah-wilayah tersebut umumnya memiliki tantangan struktural seperti keterbatasan akses informasi, tingkat pendidikan yang rendah, atau kondisi ekonomi yang memengaruhi minat politik masyarakat. Dengan berbasis data sosial, KPU Kota Kupang dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan tepat sasaran dan yang juga dikembangkan adalah pemanfaatan media digital sebagai respon terhadap perubahan pola komunikasi masyarakat perkotaan. Pemetaan sosial menunjukkan adanya pergeseran perilaku politik, terutama di kalangan generasi muda yang lebih aktif di ruang digital dibandingkan ruang-ruang konvensional. Oleh karena itu, KPU Kota Kupang mengintegrasikan pendekatan digital dengan pendekatan tatap muka untuk menjangkau spektrum pemilih yang lebih luas.

#### **c. Tantangan dalam Implementasi Pemetaan Sosial**

Meskipun pemetaan sosial menawarkan banyak manfaat, implementasinya di tingkat lokal tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data sosial yang mutakhir dan akurat. Perubahan dinamika sosial yang cepat, seperti urbanisasi dan mobilitas penduduk, sering kali menyebabkan data sosial menjadi tidak relevan jika tidak diperbarui secara berkala. Hal ini dapat memengaruhi ketepatan strategi yang dirancang oleh KPU.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Proses pemetaan sosial yang komprehensif membutuhkan tenaga dengan kompetensi sosiologis dan kemampuan analisis sosial yang memadai. Di sisi lain, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki keterbatasan struktural yang membuat pemetaan sosial belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Selain faktor internal, tantangan eksternal juga muncul dari rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat

terhadap institusi politik. Dalam perspektif sosiologi politik, ketidakpercayaan ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman historis, persepsi terhadap elite politik, serta kekecewaan terhadap kebijakan publik. Kondisi ini membuat peningkatan partisipasi politik tidak dapat hanya mengandalkan sosialisasi teknis pemilu, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial yang lebih persuasif dan dialogis.

Faktor budaya lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa komunitas, keputusan politik masih sangat dipengaruhi oleh relasi patron-klien atau arahan tokoh tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menghambat upaya KPU dalam mendorong partisipasi politik yang bersifat rasional dan mandiri.

#### d. Implikasi Sosiologis terhadap Partisipasi Politik

Kajian ini menunjukkan bahwa pemetaan sosial memiliki implikasi sosiologis yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik. Pemetaan sosial memungkinkan KPU Kota Kupang untuk memahami masyarakat bukan sekadar sebagai pemilih, tetapi sebagai subjek sosial yang memiliki latar belakang, kepentingan, dan pengalaman politik yang beragam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatoris yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses politik. Secara keseluruhan, keberhasilan strategi KPU Kota Kupang dalam meningkatkan partisipasi politik sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan pemetaan sosial dengan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemilu. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memperkuat pendekatan sosiologis, pemetaan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemetaan sosial berdampak positif terhadap efektivitas sosialisasi pemilu, terutama melalui pendekatan berbasis komunitas, pelibatan tokoh lokal, dan pemanfaatan media digital. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, data sosial yang belum mutakhir, serta rendahnya literasi dan kepercayaan politik pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemetaan sosial menjadi kunci penting bagi KPU Kota Kupang dalam mendorong partisipasi politik yang berkelanjutan dan memperkuat kualitas demokrasi lokal. Menemukan bahwa implementasi pemetaan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, ketersediaan data sosial yang belum sepenuhnya mutakhir, serta rendahnya literasi politik dan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi politik. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pemetaan sosial memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pembaruan data secara berkelanjutan, serta kolaborasi yang lebih luas dengan aktor lokal dan lembaga sosial di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. (2014). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Sofian. (2012). Partisipasi Politik dan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 201–214.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kacung Marijan. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih*. Jakarta: KPU RI.
- KPU Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Santoso, Topo. (2016). Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi Lokal. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 345–366.